



LAPORAN KINERJA 2023

DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATU
BARA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, Serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturab Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaopran Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekak yang kuat untuk menginformasikan capain kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Secara keseluruhan penyenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perikanan dan Peternakan KAbupaten Batu Bara telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indicator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabuapten Batu Bara Tahun 2023

Lima Puluh Pesisir, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KAB. BATU BARA**



**Antoni Ritongan, SP
NIP. 19690529 199303 1 005**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara	8
1.4 Isu – Isu Strategis Pengembangan Sektor Perikanan dan Peternakan.....	26
1.5 Sistematika Penyusunan.....	34
PERENCANAAN KINERJA	36
2.1 Perencanaan Strategis.....	36
2.2 Perjanjian Kinerja.....	38
AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	45
3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara. .	63
PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023....	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	24
Tabel 3. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan.....	25
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.....	25
Tabel 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	29
Tabel 6. Tujuan dan sasaran RPJMD 2019 – 2023.....	37
Tabel 8. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	38
Tabel 9. Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	39
Tabel 10. Formula Pengukuran Kinerja dan Teknik Pengumpulan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	44
Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	44
Tabel 12. Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	46
Tabel 13. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB.....	47
Tabel 14. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB.....	48
Tabel 15. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi.....	49
Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.....	50
Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi.....	53
Tabel 18. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.....	54
Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.....	58
Tabel 20. Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan...	59
Tabel 21. Capaian Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan.....	60
Tabel 22. Capaian Indikator Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan.....	61
Tabel 23. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2023.....	64
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	68



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah dicanangkan pada tahun 2023. Berikut adalah rincian dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	2023			TARGET AKHIR RENSTRA 2023	CAPAIAN TAHUN S/D 2022 TERHADAP AKHIR RENSTRA 2023
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	1.1 Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	3,03	3,15	3,00	95,24	3,67	81,74
		1.2 Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	0,76	1,00	0,77	77,00	1,4	55,00
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	2.1 Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	12,52	12,80	16,90	132,00	87,65	19,28
		2.2 Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	15,46	20,00	20,81	104,05	96,4	21,59
		2.3 Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	11,97	15,00	14,83	98,88	76,58	19,37
3.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	3.1 Produksi Daging Sapi	282,16	310	306,43	98,84	310	98,85
		3.2 Produksi Daging Kambing	27,61	30	21,02	70,07	30	70,07
		3.3 Produksi Daging Domba	52,45	53	47,41	91,17	53	89,45
		3.4 Produksi Telur	370,54	450	608,9	135,31	450	135,31
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai AKIP OPD	BB	BB (77,00)	BB (70,10)	91,04	BB (77)	91,04



Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 9 (Sembilan) diantaranya telah mencapai target dan 1 (satu) indicator belum mencapai target. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 pada tingkat kategori **Tinggi** walaupun 1 (satu) indicator yang belum mencapai target. Akan tetapi masih banyak tantangan dan permasalahan yang masih belum dapat diatasi dalam pengembangan pembangunan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara terutama kesejahteraan pelaku utama serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2024 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara akan merencanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan dengan mempertajam program/kegiatan dan menganalisis permasalahan dan peluang disetiap indikator dengan memperhatikan kondisi perkembangan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara demi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama baik nelayan dan pembudidaya sebagai mana Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yaitu ***Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Menjadi Masyarakat Industry Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya serta religius***".



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang– Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh–sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip–prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023, maka



LKjIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2023 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Bupati Batu Bara.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini ditujukan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara;
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.



1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara

a. Kedudukan

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan kemudian melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 61 tahun 2022 tentang Tugas dan Pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menjabarkan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan peternakan. Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perikanan dan peternakan;
- e. pembinaan terhadap uptd dan kelompok jabatan fungsional dinas perikanan dan peternakan;
- f. pemberian petunjuk dan arahan kepada sekretaris, kepala bidang dan unit pelaksana teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dan unit pelaksana teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dalam bidang perikanan dan peternakan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- i. menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan dinas perikanan dan peternakan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/ wakil bupati dan sekretaris daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :



- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
- c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada dinas perikanan dan peternakan serta uptd;
- d. pengkoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar operasional prosedur (sop);
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada para subbagian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta mengkoordinasikan para kepala sub bagian di lingkungan sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat dinas perikanan dan peternakan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan sumberdaya manusia. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah :

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;



- b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana;
- d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya manusia;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
- g. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- h. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

b. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. penyusunan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program, kegiatan, anggaran, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;



- e. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator program dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

c. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- f. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator keuangan dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

3. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;



- c. pelaksanaan pengelolaan data sumber daya pesisir, perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap;
- g. pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan sosialisasi hukum dan peraturan perikanan, koordinasi pengawasan dan kerjasama antar wilayah;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perikanan tangkap dan sumber daya perikanan;
- j. pelaksanaan penyusunan rencana pelestarian dan rehabilitasi kawasan pesisir, penanganan bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim, dan serta koordinasi perlindungan sumber daya perikanan;
- k. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- l. pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap;
- m. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- n. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pemanfaatan sumber daya perikanan;



- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis standarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal;
- d. pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha penangkapan ikan;
- g. pelaksanaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan rekomendasi ketelusuran hasil perikanan tangkap;
- l. pelaksanaan rekomendasi penyaluran dan pemanfaatan bbm untuk nelayan;
- m. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- n. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.

b. Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pengendalian sumber daya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah:



- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengendalian sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan identifikasi pemanfaatan sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu;
- d. pelaksanaan pembinaan mitigasi bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perairan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi kerusakan sumber daya perikanan;
- f. pelaksanaan pemulihan stok sumber daya ikan di perairan;
- g. pelaksanaan pembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan di perairan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelengkapan izin penangkapan ikan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi usaha perikanan tangkap dan pengadaan kapal penangkap ikan;
- k. pelaksanaan fasilitasi penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas);
- n. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.



4. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan profil data usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana di kawasan budidaya;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem kesehatan ikan di lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang budidaya;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem produksi usaha budidaya perikanan;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem perbenihan perikanan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan identifikasi penumbuhan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan akses permodalan dan investasi usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan dan teknologi produk olahan hasil perikanan;
- n. pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;



- o. pelaksanaan penjaminan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi serta promosi produk hasil perikanan;
- q. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- r. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha serta kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan analisis dan pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pembinaan dan bimbingan penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- f. pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
- g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, peningkatan kelas kelompok dan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap skala usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;



- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan akses pasar dan promosi produk perikanan;
- k. pelaksanaan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan kepada pelaku usaha dan kelompok pemasar produk perikanan;
- n. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan di Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi budidaya ikan air payau, laut dan air tawar;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha budidaya ikan air payau, laut dan air tawar;
- c. pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana budidaya ikan air payau, laut dan air tawar, dan bimbingan pembuatan pakan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;
- d. pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang budidaya ikan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan komoditas ikan unggulan, serta inovasi dan adaptasi teknologi budidaya ikan;



- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peredaran induk dan benih ikan sesuai standar nasional indonesia;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan, pembinaan, monitoring pada usaha budidaya ikan;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan untuk kegiatan usaha budidaya ikan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan kesehatan ikan, dan identifikasi kebutuhan sarana produksi usaha budidaya ikan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya ikan;
- k. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya ikan;
- l. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan di Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan perbibitan dan produksi, keswan dan kesmavet serta bina usaha dan pemasaran;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;



- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, keswan dan pemasaran;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam usaha peternakan, investasi dan pemasaran;
- h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbibitan dan produksi ternak;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pakan, dan produksi di bidang peternakan;



- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, perbibitan ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (hpt);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hpt;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit hpt;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak;
- k. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- l. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;



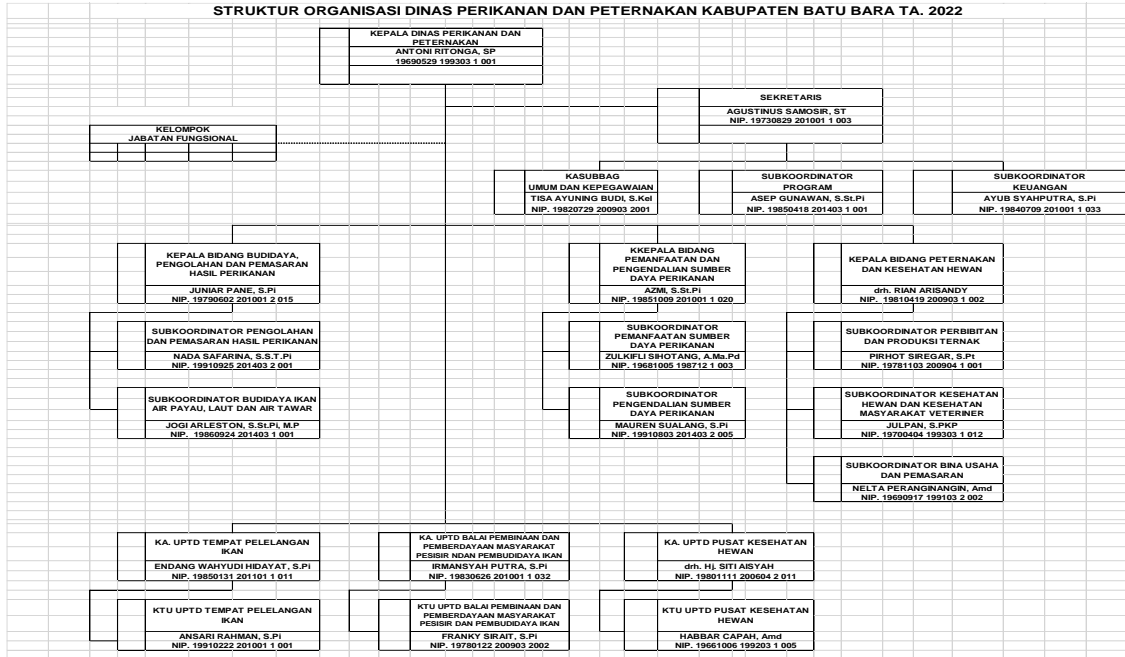
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- j. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- k. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- l. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- q. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



c. Subkoordinator Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- f. memfasilitasi promosi dan kerjasama / kemitraan hasil produk, usaha peternakan dan pemasaran;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- j. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator bina usaha dan pemasaran dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terdiri sumber daya manusia dan aset sarana dan prasarana, uraian dari masing-masing sumberdaya adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya manusia

Sumber daya Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terdiri dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yaitu:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	2023	%
1	Pasca Sarjana	6 Orang	9,5
2	Sarjana	45 Orang	66,7
3	Diploma III	7 Orang	11,1
4	Diploma II	1 Orang	1,6
5	SLTA	7 Orang	11,1
	Jumlah	65 Orang	100%

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara

Tabel 3. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan



No	Pendidikan	Uraian
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekertaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	3 Orang
4	Kasi/Kasubag/Sub Koordinator	10 Orang
5	Kepala UPTD	3 Orang
6	Kepala TU UPTD	3 Orang
5	Staf	46 Orang
	Jumlah	65Orang

2.2.2 Aset Sarana Prasarana

Uraian Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Sebagai Berikut :

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

No.	Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah
1	Gedung Kantor ($\pm 771,75 \text{ m}^2$)	1 Unit
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Unit
3	Balai Pelatihan Sekaya Maritim	1 Unit
4	Kendaraan Roda Empat	7 Unit
5	Kendaraan Roda 6	1 Unit
6	Kendaraan Roda Dua	18 Unit
7	Kapal Motor	1 Unit
8	Pasar Hewan	1 Unit
9	Pusat Kesehatan Hewan	1 Unit
10	Pusat Kesehatan Hewan Pembantu	2 Unit
11	Pos Pelayanan Insensinasi Buatan (IB)	2 Unit

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara



1.4 Isu – Isu Strategis Pengembangan Sektor Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara

1. Produksi Hasil Budidaya Masih Rendah

Kabupaten Batu Bara memiliki Panjang garis patai sebesar 62 km, tentunya itu merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Salah satu potensi perikanan yang potensial untuk dikembangkan adalah perikanan budidaya dikarenakan perikanan budidaya dapat direkayasa dengan penggunaan atau penerapan teknologi budidaya hasil dari riset atau penelitian yang terus berkembang.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara cukup besar yaitu seluas 5.277 Ha yang terdiri dari Potensi Budidaya Air Payau 4.030 Ha dan Air Tawar sebesar 1.247 Ha dengan kooditas unggulan seperti Udang, Ikan Kerapu, Ikan Lele, Ikan Gurane, Ikan Nila, Mas, Patin, Nila Salin, Bandeng, akan tetapi baru 55 % dari potensi tersebut yang dimanfaatkan untuk lokasi usaha budidaya perikanan. Sehingga mengakibatkan produksi perikanan budidaya masih rendah. Factor lain yang menyebabkan produksi perikanan masih rendah anatara lain :

- a. Kurangnya Stok Benih dan Induk Unggul di Kabupaten Batu Bara sehingga pasokan benih dan induk ikan masih dari luar daerah ;
- b. Alih fungsi lahan budidaya khususnya lahan budidaya udang (tambak)
- c. Belum berkembangnya teknologi pembuatan pakan ikan mandiri
- d. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk lokasi usaha budidaya ikan
- e. Masih rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan akan teknologi budidaya ikan dan pasar serta akses permodalan

2. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap

Sebagai Kabupaten yang memiliki Panjang garis pantai sepanjang 62 km, Kabupaten Batu Bara tentunya memiliki potensi yang cukup besar khususnya dalam bidang perikanan tangkap, akan tetapi dalam 5 (lima) tahun terakhir, potensi yang besar tersebut belum dikelola secara optimal, hal ini bisa dilihat dari sumbangsih PDRB sub sektor perikanan terhadap PDRB hanya sebesar 3,37 % pada tahun terakhir periode renstra. Selain factor harga jual dan factor lainnya,



produksi perikanan tangkap akan mempengaruhi terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Batu Bara.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi belum optimalnya produksi perikanan tangkap antara lain :

- a. Efek dari penggunaan alat tangkap terlarang yang merusak ekosistem laut seperti matinya terumbu karang ;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap seperti Pabrik Es, Cold Storage, Pelabuhan Perikanan, SPBUN dll ;
- c. Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang mana hutan mangrove sebagai tempat berkembang biak hewan-hewan laut
- d. Masih rendahnya penggunaan aplikasi teknologi penangkapan ikan
- e. Belum adanya industry pengolahan hasil perikanan
- f. Pertumbuhan kapal tidak dibarengi dengan perizinan yang lengkap

3. Masih Rendahnya Nilai Daya Saing Produk

Daya saing produk dapat diartikan kemampuan suatu produk atau komoditi masuk ke dalam pasar luar negeri atau dalam negeri dan kemampuan untuk bertahan dalam pasar tersebut. Di Kabupaten Batu Bara kegiatan pengolahan hasil perikanan masih sebatas industry rumahan yang masih menggunakan teknologi sederhana tanpa ada proses packing yang sederhana serta pemasaran hanya melalui agen-agen yang datang sehingga kurang memiliki daya saing dan sulit untuk masuk kepasar yang lebih luas. Factor yang dapat meningkatkan atau yang memiliki daya ungkit tinggi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan adalah berkembangnya industry pengolahan.

Produk unggulan hasil pengolahan ikan di Kabupaten Batu Bara antara lain : Ikan Teri, Pindang Ikan Kembung / Kembung Rebus, Ikan Asin, Kepah Asin, Udang Kering, Terasi / Belacan, Kerupuk Ikan dll. Di Kabupaten Batu Bara terdapat juga Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bekerja sama dengan Perusahaan-perusahaan pengolah ikan yang tujuan pasarnya adalah ekspor dengan komoditas utama adalah daging kepiting dan cumi/sotong.

Factor-faktor yang mempengaruhi belum berkembangnya industry pengolahan hasil di Kabupaten Batu Bara antara lain :

- a. Belum adanya peta pengolahan hasil di Kabupaten Batu Bara yang memuat potensi serta produk-produk unggulan kabupaten



- b. Teknologi pengolahan masih sederhana
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama pengolahan hasil perikanan akan peningkatan daya saing produknya
- d. Masih kurangnya sarana dan prasaran pengolahan hasil perikanan yang memadai

3.1.2 Permasalahan Bidang Peternakan

1. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dari sejumlah aktivitas yang berkesinambungan yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan rancangan produk, harga, promosi dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran sesuatu yang bernilai pada kelompok sasaran.

Pemasaran hasil produksi peternakan dan perkebunan berarti kegiatan bisnis dimana produk yang dipasarkan adalah berupa komoditi peternakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Komoditas tersebut memiliki sifat mudah rusak (perishable) dan jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit (bulky). Sifat tersebut akan mempengaruhi mekanisme pasar dalam pemasaran. Oleh karena itu, sering sekali terjadi harga produksi peternakan yang dipasarkan menjadi naik-turun (berfluktuasi) secara tajam sehingga sering menimbulkan kerugian di pihak peternak atau produsen. Karena kejadian semacam ini maka petani atau produsen memerlukan kekuatan untuk melaksanakan pemasaran ini.

Permasalahan lain yang menyebabkan belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian antara lain : lemahnya infrastruktur, lemahnya informasi pasar, skala pasar pertanian yang relatif kecil, kurangnya pengetahuan, misalnya grading dan standarisasi, tingginya biaya transaksi, lemahnya produsen (peternak) dalam memanfaatkan peluang pasar, produsen (peternak dan pekebun) melakukan usaha tidak berdasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usahatani yang diusahakan secara turun temurun.



2. Adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sporadi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas

Lalu lintas ternak antar kabupaten maupun antar propinsi memungkinkan adanya mutasi penyakit. Oleh karenanya, diperlukan adanya pengawasan lalulintas ternak oleh petugas kesehatan hewan terutama di perbatasan daerah.

3. Perlunya optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner

Dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner, diperlukan adanya pembangunan Rumah Potong Hewan sehingga konsumen akan mendapatkan produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Tabel 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2019 - 2023

Visi : Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya			
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Perikanan	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan dan peternakan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Kolaborasi dan Sinergitas Perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah serta Pihak Swasta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Usaha Perikanan Budidaya Air Payau, Air Tawar dan Air Laut secara berkelanjutan dan terintegrasi serta peningkatan daya saing produk hasil perikanan 2. Pengembangan Usaha Peternakan Rakyat dengan meningkatkan kualitas sumberdaya genetic hewan ternak unggulan



			melalui teknologi Insenminasi buatan, serta pengembangan sentra-sentra peternakan terintegrasi dengan perkebunan.
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap yang mandiri dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di wilayah sentra-sentra produksi perikanan tangkap 2. Pemberian perlindungan usaha bagi nelayan kecil melalui asuransi nelayan 3. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 4. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 5. Pengembangan SDM Perikanan Tangkap melalui pendampingan dan pelatihan 6. Pengembangan alih teknologi tentang penangkapan ikan



		<p>Pengembangan Perikanan Budidaya melalui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kampung-Kampung Tematik Perikanan Budidaya 2. Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut 3. Revitalisasi Tambak dan Saluran Irigasi Tambak 4. Pengembangan Teknologi Pembuatan Pakan Ikan Mandiri berbasis Bahan Baku Lokal 5. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Untuk Usaha Budidaya Perikanan Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga 6. Pengembangan SDM Perikanan Budidaya melalui Pendampingan, Penyuluhan dan
--	--	---	--



			<p>Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya</p> <p>7. Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) pada Kelompok-Kelompok Pembudidaya Ikan</p>
		<p>Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasarana Hasil Perikanan Unggulan Kabupaten Batu Bara</p>	<p>1. Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung industri pengolahan hasil perikanan</p> <p>2. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>3. Pendampingan dan Pembinaan Unit Pengolah Ikan (UPI) berbasis ekspor</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Produk Perikanan</p> <p>5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan diversifikasi olahan produk perikanan</p>



	Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan	Peningkatan Produksi Ternak Unggulan Kabupaten Batu Bara seperti Sapi, Domba, Kambing dan Telur unggas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan Ternak melalui aplikasi teknologi Insensisasi Buatan 2. Pengembangan usaha peternakan komunal yang terintegrasi antara peternakan dengan perkebunan 3. Pemberian bantaun induk hewan ternak ruminansia dan ternak unggas 4. Pelayanan Kesehatan hewan pada seluruh wilayah potensi peternakan 5. Meningkatkan SDM petugas Kesehatan hewan dan petugas IB melalui Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Balai-balai kementerian pertanian 6. Pengembangan unit-unit pengolahan pakan ternak 7. Pendampingan terhadap pelaku utama peternakan
--	---------------------------------------	--	---

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan perikanan dan peternakan di Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Masih adanya potensi pengembangan perikanan terutama potensi perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut



2. Permintaan Komoditas Perikanan terus meningkat baik domestic maupun Eksport Komoditas perikanan
3. Lokasi kabupaten sebagai lokasi proyek strategis nasional akan berpengaruh terhadap permintaan pasar produk perikanan
4. Perikanan Budidaya masih bisa dikembangkan dengan memanfaatkan Lahan-lahan yang terbengkalai dan lahan pekarangan
5. Komoditas perikanan dapat diolah menjadi beberapa produkturunannya sehingga dapat meningkatkan nilai jual.
6. Sektor Industri Pengolahan bisa dikembangkan
7. Kebijakan Pemerintah Pusat, Provisi dan Daerah yang mendukung tentang pengembangan sector kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.
8. Potensi sumber daya alam masih besar
9. Permintaan pasar akan hewan ternak cukup tinggi
10. Dapat diusahakan baik sebagai usaha utama maupun sampingan
11. Sumber Daya Manusia / petugas kesehatan hewan cukup memadai

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja/penetapan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi



Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Batu Bara untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja. Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis Capaian Kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- **Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Oleh sebab itu, perlu analisis dalam menentukan sasaran strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan dan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023. Dari hasil analisis tersebut dapat ditetapkan indikator-indikator utama dalam pembangunan perikanan dan indikator-indikator sasaran tersebut harus dicapai dengan kerja sama antar sektor sehingga tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara dapat tercapai.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan potensi perikanan dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Program-program pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara sudah dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara Tahun 2019 – 2023.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara untuk jangka waktu 2019-2023 yaitu “ **MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERBUDAYA SERTA RELIGIUS** ”, dirumuskan 8 (delapan) misi yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019—2023 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara;



5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara;

Berdasarkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 maka Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang bersinergi mendukung visi misi kepala daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan secara terperinci adalah.

Tabel 6. Tujuan dan sasaran RPJMD 2019 - 2023

Misis RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi No.3 Mewujudkan Masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Misi No.4 Mewujudkan industri berbasis sumberdaya unggulan kabupaten batu bara	Bertumbuhnya industry pengolahan hasil pertanian,peternakan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah sector pertanian, peternakan dan perikanan

Berdasarkan telaah visi,misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Batu Bara 2019-2023 tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan akan menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain :



Tabel. 8. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET /CAPAIAN KINERJA TUJUAN / SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Perikanan	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	3,28	3,30	3,33	3,36	3,39	3,42
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	79,65	4,00	5,00	11,60	12,70	12,80
			Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	76,4	10,00	10,50	11,00	15,00	20,00
			Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	64,58	3,00	4,00	10,00	12,00	15,00
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	BB	BB

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019- 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 9. Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan dan peternakan dalam PDRB	1. Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	%	3,04
		2. Kontribusi sub sektor peternakan dalam PDRB	%	0.78
2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Persentase peningkatan volume produksi perikanan tangkap	%	12,80
		Persentase peningkatan volume produksi perikanan budidaya	%	20,00
		Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan	%	15,00
3.	Meningkatnya produksi hasil peternakan unggulan	Produksi Daging Sapi	Ton	310
		Produksi Daging Kambing	Ton	30
		Produksi Daging Domba	Ton	52
		Produksi Telur	Ton	450
4.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (77)

Adapun program-program untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara adalah sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.797.754.222	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	904.788.000	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	452.326.262	
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	21.650.000	



5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	88.900.000	
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	266.629.040	
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.349.000.000	
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	714.712.585	
9	Program Penyuluhan Pertanian	32.484.644	
	Total	10.628.244.753	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Tabel 10. Formula Pengukuran Kinerja dan Teknik Pengumpulan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	1. Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n - PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1	X 100%	Badan Pusat Statistik Kab. Batu Bara, Data Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan serta Daftar Rata-Rata Harga Komoditas Perikanan
			PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1		
		2. Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n - PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1	X 100%	
			PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1		
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	1. Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1	X 100%	Data Produksi Hasil Tangkapan Ikan dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1		
		2. Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1	X 100%	
			Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1		
		3. Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun n - Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun n-1	X 100%	
			Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun n-1		



3.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	1.	Produksi Daging Sapi	Produksi Daging Sapi Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan
		2.	Produksi Daging Kambing	Produksi Daging Kambing Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan
		3.	Produksi Daging Domba	Produksi Daging Domba Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan
		4.	Produksi Telur	Produksi Telur Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Akip dari Inspektorat



Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini :



Tabel 12. Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	2023			TARGET AKHIR RENSTRA 2023	CAPAIAN TAHUN S/D 2022 TERHADAP AKHIR RENSTRA 2023
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	1.1 Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	3,03	3,15	3,00	95,24	3,67	81,74
		1.2 Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	0,76	1,00	0,77	77,00	1,4	55,00
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	2.1 Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	12,52	12,80	16,90	132,00	87,65	19,28
		2.2 Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	15,46	20,00	20,81	104,05	96,4	21,59
		2.3 Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	11,97	15,00	14,83	98,88	76,58	19,37
3.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	3.1 Produksi Daging Sapi	282,16	310	306,43	98,84	310	98,85
		3.2 Produksi Daging Kambing	27,61	30	21,02	70,07	30	70,07
		3.3 Produksi Daging Domba	52,45	53	47,41	91,17	53	89,45
		3.4 Produksi Telur	370,54	450	608,9	135,31	450	135,31
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai AKIP OPD	BB	BB (77,00)	BB (70,10)	91,04	BB (77)	91,04

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 9 (sembilan) diantaranya telah mencapai target dengan perdistrik **sangat tinggi** dan 1 (satu) indicator belum mencapai target. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 pada tingkat kategori **Sangat Tinggi** walaupun ada 1 (satu) indicator yang belum mencapai target.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

1. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi sangat penting diperhatikan selain melihat besaran nilai PDRB itu sendiri, karena dengan melihat laju pertumbuhan berarti melihat kecepatan pertumbuhan suatu perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui melalui komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dilihat dari sudut kemampuan masing-masing sektor dalam memberikan



kontribusinya. Dimana daerah tersebut merupakan cerminan sektor bagi daerah yang bersangkutan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat.

Perhitungan Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan hanya memberikan data-data produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta nilai produksi berdasarkan harga jual rata-rata, begitupun juga untuk data-data produksi peternakan, data populasi serta data harga jual hewan ternak.

Pada tahun 2023 target kontribusi sub sektor perikanan sebesar 3,15 dan sub sektor peternakan sebesar 1,2 %, berdasarkan perhitungan dan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB Tahun 2023 sebesar 3,03 artinya target pencapaian belum memenuhi target. Berikut ini tabel capaian realisasi Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB Tahun 2023.

Tabel 13. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Indikator	Capaian Indikator Tahun 2022	Target 2023	Realisasi	Capaian
Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB	3,03	3,15	3,00	95,24

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasannya realisasi indicator Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB mengalami penurunan dari tahun 2022 dan belum mencapai target dengan capaian sebesar 95,24%.

Penyebab dari menurunnya kontribusi subsector perikanan dalam pdrb disebabkan oleh adanya peningkatan biaya produksi usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang disebabkan oleh adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang mengakibatkan kenaikan BBM Jenis Solar pada Tingkat nelayan. Selain itu penyebab belum tercapainya target kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB adalah harga jual ikan yang tidak stabil terutama pada saat musim ikan atau hasil tangkapan melimpah.



2. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi sangat penting diperhatikan selain melihat besaran nilai PDRB itu sendiri, karena dengan melihat laju pertumbuhan berarti melihat kecepatan pertumbuhan suatu perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui melalui komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dilihat dari sudut kemampuan masing-masing sektor dalam memberikan kontribusinya. Dimana daerah tersebut merupakan cerminan sektor bagi daerah yang bersangkutan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat.

Perhitungan Indikator Kontribusi Sub Sektor Peternakan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan hanya memberikan data-data produksi peternakan, data populasi serta data harga jual hewan ternak.

Pada tahun 2023 target sub sektor peternakan sebesar 1,00 %, berdasarkan perhitungan dan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB Tahun 2023 sebesar 0,76 artinya target pencapaian belum memenuhi target. Berikut ini tabel capaian realisasi Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB Tahun 2023.

Tabel 14. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Indikator	Capaian Indikator Tahun 2022	Target 2023	Realisasi	Capaian
Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB	0,76	1,00	0,77	77

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasannya realisasi indikator Kontribusi sub sektor peternakan dalam PDRB mengalami peningkatan 1 (satu) point dari tahun 2022 akan tetapi belum mencapai pada target yang telah ditetapkan.

Factor penyebab meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan dalam PDRB tahun 2023 antara lain keberhasilan Kabupaten Batu Bara dalam pengendalian



Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta LSD melalui pelayanan vaksinasi dan pengobatan penyakit PMK dan LSD secara gratis bagi peternak sapi, kerbau, domba dan kambing. Pada tahun 2023 dinas perikanan dan peternakan telah melakukan vaksinasi sebanyak 2 (dua) kali Dosis pada $\pm 80\%$ dari total populasi khususnya populasi Sapi sebagai komoditas yang paling banyak terkena serangan PMK dan LSD.

Keberhasilan Kabupaten Batu Bara dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tersebut berdampak langsung pada permintaan ternak sapi, kambing dan domba yang terus meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak di Kabupaten Batu Bara.

3. Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang garis pantai Kabupaten Batu Bara adalah 62 km dengan 6 Kecamatan Pesisir yang berbatasan langsung dengan selat malaka serta jumlah nelayan sebanyak 20.497 orang sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup besar khususnya perikanan tangkap.

Potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara masih belum memadai seperti Cold Storage berkapasitas besar, Pabrik Es Balok dan perlengkapan / teknologi penangkapan ikan untuk nelayan. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas mutu hasil tangkapan rendah dan dapat menimbulkan penurunan harga apabila hasil tangkapan melimpah dan tidak dapat ditampung oleh cold storage. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara sebesar 59.617,25 Ton, bila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 45.242,99 Ton, artinya produksi tahun 2023 mengalami peningkatan produksi sebesar 14.374,26 Ton, hal ini dikarenakan melonjaknya hasil tangkapan beberapa jenis ikan seperti Ikan Kembung, Cumi, Gurita dan Kepiting rajungan yang dipicu oleh permintaan akan komoditas tersebut cukup besar khususnya untuk pasar ekspor yang telah mulai bergeliat serta permintaan pasar



local yang cukup besar. Adapun capaian indikator persentase peningkatan volume produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap tahun 2023

Indikator	Produksi Tahun 2022 (Ton)	Target 2023 (%)	Produksi Tahun 2023 (Ton)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap	45.241,99	12,80	59.617,25	16,90	132

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Pagu anggaran pelaksanaan program di tahun 2022 sebesar Rp. 904.788.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 887.819.500,- (98,12%).

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 51.000 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2023 tercatat sebesar 59.617,25 ton atau 116,90 %. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.



Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							
NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2022	2022			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian 2022 terhadap Akhir Renstra 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
	Produksi Perikanan Tangkap	45.241,99	51.000	59.617,25	116,90	53.125,59	112,22

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Bentuk kegiatan dari kegiatan ini adalah pemberian bantuan sarana penangkapan ikan berupa jarring ikan gembung sebanyak 1 paket untuk 1 kelompok nelayan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 126.143.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.125.000,- (99,99%)

- b) Pemberdayaan Nelayan Kecil

Bentuk kegiatan Pemberdayaan ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan usaha perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan kecil. Target dari peningkatan kapasitas nelayan yaitu jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya baik dari segi teknis maupun non teknis yaitu sebanyak 1.050 nelayan dengan realisasi 1.050 dengan dukungan dana sebesar Rp. 570.075.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 570.034.500,- (99,99%)

- c) Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Pelalangan Ikan (TPI)

2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengawasan usaha perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan, peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian sumber daya sekaligus menjaga kesinambungan dari usaha perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Selain itu, melalui pengawasan diharapkan dapat menjamin



keamanan pangan yang dalam hal ini adalah keamanan produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pagu anggaran pelaksanaan program di tahun 2023 sebesar Rp. 21.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.650.000,- (100%).

Melihat dari dukungan anggaran pada tahun 2023 yang sangat minim dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara, maka Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2023 meminta dukungan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk melakukan Pengawasan terpadu dan gabungan di wilayah perairan Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 kali operasi gabungan dan didapat sebanyak 4 armada kapal yang tertangkap melakukan penangkapan ikan di luar zonanya serta menggunakan alat tangkap terlarang.

Selain factor dukungan anggaran, factor pemicu lainnya dalam tercapainya indicator kinerja Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap antara lain :

1. Efek dari adanya kegiatan pergantian alat tangkap ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Batu Bara yang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan bantuan-bantuan alat tangkap ramah lingkungan, sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap seperti banuan mesin, bantuan sampan, bantuan premi asuransi nelayan kepada nelayan-nelayan tradisional sehingga menggairahkan industry penangkapan di kabupaten batu bara baik yang bersumber dari APBD Kabupatenn Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
2. Permintaan pasar domestic maupun ekspor akan produk hasil tangkapan berupa Ikan Kembung, Cumi-cumi, Gurita dan kepiting rajungan mengakibatkan nelayan beralih untuk menangkap jenis ikan tersebut ;
3. Mulai bergeliatnya pasar ekspor pasca pandemic *covid-19* khususnya untuk komoditas unggulan kabupaten batu bara seperti ikan Kembung, Cumi, Gurita, Rajungan, udang sehingga nelayan mulai beralih tangkapan ikan pada komoditas tersebut ;
4. Factor alamiah yang mengakibatkan melimpahnya hasil tangkapan ikan terutama ikan kembung dimana sepanjang tahun 2023 terjadi lonjakan hasil tangkapan ikan kembung dan puncaknya pada bulan Juni - September 2023 ;



5. Seiring beroperasinya TPI dan mulai berlakunya retribusi jasa usaha Tempat Pelalangan Ikan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 Dinas Perikanan melalui petugas TPI yang tersebar di 4 (empat) lokasi melakukan pencatatan hasil tangkapan ikan di gudang-gudang atau tangkahan sehingga dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat (*unreported*);

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

factor yang menghambat / tantangan pada indicator peningkatan volume produksi perikanan tangkap antara lain :

1. Efek dari melimpahnya hasil tangkapan berupa ikan kembung terjadi penurunan harga drastic akan produk ikan kembung tersebut
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana berupa Cold Storage yang berkapasitas besar untuk menampung hasil tangkapan ikan yang melimpah sehingga menurunkan kualitas mutu ikan dan menurunkan harga jula ikan
3. Adanya kelangkaan BBM bersubsidi bagi nelayan akibat adanya kenaikan harga BBM sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya biaya operasional nelayan khususnya nelayan tradisional
4. Kurangnya operasi pengawasan sumberdaya ikan akan penggunaan alat tangkap terlarang diperairan Kabupaten Batu Bara oleh PSDKP Belawan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang dapat menyebabkan kerusakan habitat ikan dan konflik nelayan.
5. Masih beroperasinya alat tangkap terlarang di perairan Kabupaten Batu Bara

4. Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara terdiri dari Perikanan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar. Menurut Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2022, Potensi Perikanan Budidaya Air Payau Seluas 4.030 Ha, Budidaya Air Tawar 1.247 Ha dan Budidaya Air Laut seluas 330 Ha. Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya

Indikator	Produksi Tahun 2022 (Ton)	Target 2023 (%)	Produksi Tahun 2023 (Ton)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	2.241,02	20,00	2.798,73	20,81	104,05

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya mencapai kenaikan sebesar 20,81 %. Angka ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 20 % atau dengan pencapaian kinerja sebesar 104,05 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023.
- b. Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup bagus sebesar 20,81 % dan telah melampaui target.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan meningkatkan produksi perikanan tersebut, program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran di tahun 2023 sebesar Rp 452,326.262,- dan terealisasi sebesar Rp 383.036.874 (84,68%). Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 2.689 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 tercatat sebesar 2.798,73 ton atau 104,08%. Capaian ini menunjukkan



bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 18. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2022	2022			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian 2022 terhadap Akhir Renstra 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
	Produksi Perikanan Budidaya	2.241,02	2.689,00	2.798,73	104,08	2.851,92	98,13

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara sebagai upaya agar para pembudidaya ikan lebih berdaya dalam meningkatkan kemampuan budidaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha budidaya ikan yang dijalani. Selain itu, melalui kegiatan ini, Dinas Perikanan dan Peternakan juga memberikan fasilitasi secara terbuka kepada masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk berusaha di bidang budidaya melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi sarana prasarana budidaya. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199. 923.770 atau sekitar 99,96%. Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 20 Kelompok Pembudidaya Ikan yang dilatih berupa kegiatan pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik 2 Angkatan, Pelatihan Cara Budidaya Ikan dalam Ember (Budidamber) sebanyak 4 Angkatan dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Mandiri sebanyak 2 Angkata.

b) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan usaha budidaya ikan tawar sesuai CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dengan harapan agar pembudidaya ikan mengalami peningkatan mutu usaha budidaya yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara juga menyediakan benih ikan air tawar dan Air Payau yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.252.236.262,- dan terealisasi Rp. 183.113.104,- atau sekitar 72,57%. Hasil dari kegiatan ini adalah



5 Paket bantuan benih ikan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan dari target kinerja sebanyak 6 paket bantuan. Adapun 1 paket yang tidak terealisasi dikarenakan adanya defisit APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Selain Faktor dukungan kegiatan dan anggaran terdapat beberapa Factor pemicu/pendorong keberhasilan peningkatan Volume produksi perikanan di Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Berkembangnya budidaya Air Tawar terutama untuk budidaya ikan lele system kolam terpal dengan memanfaatkan lahan pekarangan
2. Mulai berkembangnya usaha budidaya kerang dara / Kerang Batu di Kabupaten Batu Bara
3. Mulai berkembangnya usaha budidaya udang vaname di Kabupaten Batu Bara yang ditandai adanya investor / perusahaan yang melakukan usaha Budidaya Udang Vanama di Kabupaten Batu Bara.
4. Mulai terbukanya perusahaan / pengusaha tambak udang akan data produksi budidaya udang vaname.
5. Berkembangnya usaha budidaya Udang Vaname Sistem terpal dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terlalu luas.
6. Efek dari stimulus berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Budidaya Batu Bara yang bersumber dari dana APBD Kab. Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya
7. Kegiatan pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan usaha pada kelompok pembudidaya ikan
8. Permintaan pasar ekspor khususnya untuk budidaya udang dan kerapu terus meningkat

a. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun factor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya baik budidaya air payau, air tawar dan air laut



2. Kurangnya pasokan benur udang vaname yang cukup diakibatkan belum adanya Unit Pembenihan/Hatchery Udang Vaname di Kabupaten Batu Bara sehingga masih mengandalkan pasokan dari Kabupaten lain.
3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menrapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
4. Terjadinya kenaikan harga pakan ikan sehingga menambah biaya produksi
5. Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya ikan dan udang yang diterapkan pembudidaya di Kabupaten batu Bara
6. Fluktuasi harga ikan terutama harga ikan lele yang mengakibatkan pembudidaya berhenti usaha dan beralih ke komoditas budidaya yang lain.

5. Persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Selain potensi perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi pengembangan usaha di bidang Pengolahan Hasil Perikanan baik pengolahan hasil dari produk perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya, sampai sejauh ini sektor pengolahan belum terkelola secara optimal padahal sektor pengolahan ini kalau dikelola secara optimal akan menjadi sumber ekonomi diwilayah pesisir sebagai sumber ekonomi utama maupun tambahan.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Batu Bara sebanyak 1.788 Orang, jumlah unit pengolahan ikan sebanyak 5 Unit, jumlah kelompok pengolahan sebanyak 25 Kelompok dengan hasil olahan unggulan berupa : Ikan Teri Nasi, Ikan Teri, Ikan Asin, Pindang Ikan / Kembung Rebus, Kepah Asin, Terasi/Belacan, Abon Ikan, Kerupuk Ikan dll. Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi hasil olahan produk perikanan dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Produksi Tahun 2022 (Ton)	Target Peningkatan (%)	Produksi Tahun 2023 (Ton)	Realisasi (%)	Pencapaian Target (%)
Persentase Peningkatan Voume Produksi Pengolahan Hasil Produk Perikanan	1.239,00	15,00	1.409,19	14,83	98,88

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan mencapai kenaikan sebesar 14,83 %. Angka ini hampir mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 15 % dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 98,88 %.
- b. Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2023 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,83 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Indikator Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan didukung oleh 1 (satu) program yaitu :

- a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni pemasaran. Pagu anggaran pelaksanaan program di tahun 2023 sebesar Rp. 88.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.900.000,- (91%).



Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah persentase produksi perikanan yang diolah Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan. Capaian kinerja Jumlah Produksi Pengolahan Tahun 2023 adalah sebesar 1.409,19 Ton dari target sebesar 1.425 Ton.

Tabel 20. Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							
NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2022	2022			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian 2022 terhadap
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.239,00	1.425,00	1.409,19	98,89	1.412,64	99,76

Faktor pemicu keberhasilan pencapaian target indicator peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan antara lain :

1. Banyaknya permintaan apasar akan produk hasil olahan perikanan terutama untuk produk Ikan Teri Nasi, Ikan Asin, Kepah Kering, Ikan Pindang dll dari pasar local maupun luar daerah ;
2. Mulai berkembangnya pasar digital sehingga meningkatkan permintaan pasar akan produk olahan hasil perikanan.
3. Adanya efek turunan dari melimpahnya hasil tangkapan di Kabupaten Batu Bara yang mengakibatkan rendahnya harga jual ikan segar sehingga ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan kering atau ikan asin
4. Dilakukannya kegiatan pendataan hasil terutama pendataan pada gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan serta perusahaan Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Batu Bara sehingga dapat mengurangi kehilangan data produksi pengolahan yang tidak tercatat (*unreported*).

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun factor penghambat dalam peningkatan volume produksi pengolahan hasil produk perikanan antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
2. Teknologi pengolahan hasil perikanan masih tradisional
3. Diversifikasi Produk olahan hasil perikanan belum beragam
4. Pengemasan produk hasil olahan masih sederhana sehingga belum menarik minat konsumen milenial



5. Masih banyaknya data hasil olahan yang belum terdata terutama di gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan akibat dipersulitnya akses masuk ke lokasi pengolahan tersebut.
6. Masih belum termanfaatkannya limbah hasil perikanan tangkap seperti ikan rucaah, kulit kepiting/rajungan sebagai produk olahan yang memiliki nilai jual/nilai tambah

6. Peningkatan Produksi Ternak Unggulan

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan produksi ternak unggulan di Kabupaten Batu Bara adalah dengan menggunakan indikator produksi daging ternak unggulan di Kabupaten Batu Bara antara lain Produksi Daging Sapi, Produksi Daging Kambing, Produksi Daging Domba dan Produksi Telur. Berdasarkan data populasi ternak tahun 2023, diketahui bahwa potensi peternakan di Kabupaten Batu Bara cukup tinggi yaitu 41.264 ekor sapi, Kerbau 944 Ekor yang tersebar di setiap kecamatan dengan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Lima Puluh. Di samping itu populasi ternak ruminansia kecil juga cukup tinggi yakni sekitar 20.441 ekor kambing dan 41.949 ekor domba. Capaian dari Indikator Peningkatan Produksi Ternak unggulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21. Capaian Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan

Indikator	Target 2023 (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
Produksi Daging Sapi	310	306,43	98,84
Produksi Daging Kambing	30	21,02	70,07
Produksi Daging Domba	52	47,41	91,17
Produksi Telur	450	608,90	135,31

Berdasarkan data di atas, hanya produksi daging kambing yang belum mencapai target sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya mencapai target walaupun 2 (dua) indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

**a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja**

Factor pemicu / pendorong pencapaian kinerja peningkatan produksi ternak unggulan antara lain :

1. Adanya kesadaran peternak akan penerapan teknologi Insensinasi Buatan (IB) sehingga angka kelahiran ternak meningkat dibarengi dengan peningkatan genetic hewan ternak
2. Pelaksanaan vaksinasi PMK massive serta pelaksanaan pelayanan Kesehatan hewan secara berkala sehingga kasus PMK di Kabupaten Batu Bara dapat dikendalikan dan bahkan Kabupaten Batu Bara menjadi rujukan dalam penanganan PMK Provinsi Sumatera Utara
3. Factor alami Kabupaten Batu Bara yang memiliki banyak perkebunan sebagai tempat menggembala ternak serta sebagai sumber hijauan pakan ternak
4. Sudah berkembangnya manajemen pakan ternak

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Faktor yang menghambat dalam pencapaian target kinerja peningkatan produksi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 adalah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta wabah Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak ruminansia khususnya ternak Sapi, Kambing dan Domba. Serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Batu Bara terdeteksi pada awal bulan Mei dan penyebarannya kasusnya sangat cepat, total ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Batu Bara sebanyak 5.646 Ekor. Sampai akhir Bulan Desember 2023 total kasus PMK di Kabupaten Batu Bara adalah 0 (nol) Ekor artinya seluruh ternak yang terserang penyakit PMK telah sembuh 100%.

Dampak negative akibat adanya wabah PMK di Kabupaten Batu Bara adalah ketakutan masyarakat untuk mengkonsumsi daging terutama daging sapi, kambing dan domba, hal tersebut yang mengakibatkan rendahnya produksi daging tahun 2023.

Selain adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda ternak di Kabupaten Batu Bara, factor lain yang menghambat rendahnya produksi ternak unggulan adalah masih rendahnya peternak dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.



7. Nilai AKIP OPD

AKIP merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun hasil capaian dari nilai AKIP Dinas Perikanan Tahun 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 22. Capaian Indikator Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan

Indikator	Nilai AKIP 2022 (Nilai)	Target 2023 (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
Nilai AKIP OPD	BB (74,12)	BB (77,00)	BB (70,1)	91,04

dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi AKIP oleh tim SAKIP Kabupaten Batu Bara, Dinas Perikanan dan Peternakan memperoleh nilai 70,10 dengan kategori BB (sangat baik) dan telah mencapai target.

Factor pemicu tercapainya target nilai AKIP ini adalah adanya komitmen Kepala Dinas untuk memperbaiki mulai dari identifikasi masalah melalui pohon kinerja, penetapan indicator, pendelagasian kinerja (cascading), pengalokasian anggaran sesuai dengan target kinerja, melakukan kontrak kerja sampai pada evaluasi capaian kinerja secara berkala. Selain itu juga meningkatnya nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan tidak lepas dari Tim AKIP Kabupaten Batu Bara yang terus melakukan pembinaan dan perbaikan sehingga nilai AKIP OPD dan Nilai AKIP Kabupaten mengalami peningkatan.

Adapun factor penghambat dalam pencapaian target nilai AKIP OPD adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran ASN tentang pentingnya Akuntabilitas Kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja, factor lain yang menghambat pencapaian kinerja adalah perjanjian kinerja hanya sampai pada level eselon III (tiga) belum pada level perjanjian kinerja individu.



Dari analisis factor penghambat dan factor pendorong keberhasilan untuk mencapai tujuan / target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dapat disimpulkan bahwasannya peluang dalam pengembangan usaha di bidang perikanan masih cukup terbuka lebar apabila dikelola dengan maksimal dengan didukung oleh program/kegiatan yang menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dalam upaya peningkatan produksi serta peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara serta harus didukung oleh seluruh *Stake Holder* demi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yaitu “***Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Menjadi Masyarakat Industry Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya serta religius***”.

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

Realisasi anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Periode 2019 – 2023 serta mencapai kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2023



No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI AKIP	77,00	Nilai	6.797.754.222	70,10	Nilai	6.631.164.431	91,04	97,55		1. Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2022 sudah sesuai dengan Juknis, 2. Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2023 Telah Mengalokasikan Anggaran untuk Penanganan Kasus PMK
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	24.979.610	100	Persen	23.966.145	100,00	95,94		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	19.979.665	4	Dokumen	18.966.200	100,00	94,93		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	4.999.945	2	laporan	4.999.945	100,00	100,00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	5.752.072.167	100	Persen	5.685.510.594	100,00	98,84		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang	5.752.072.167	65	Orang	5.685.510.594	100,00	98,84		
				Administrasi Umum perangkat Daerah		100	Persen	263.271.845	100	Persen	233.928.536	100,00	88,85		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31	Jenis	50.062.884	31	Jenis	49.811.000	100,00	99,50		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Paket	12.119.618	15	Paket	12.088.500	100,00	99,74		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	29.997.500	12	Paket	27.212.500	100,00	90,72		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	46.091.843	8	Paket	45.638.300	100,00	99,02		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	12	Dokumen	13.500.000	100,00	75,00	Tidak Dapat dicairkan dikarenakan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	107.000.000	12	laporan	85.678.236	100,00	80,07	Tidak Dapat dicairkan dikarenakan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah	100	Persen	12.500.000	100	Persen	12.500.000	100,00	100,00		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	12.500.000	1	Unit	12.500.000	100,00	100,00		



			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	506.885.000	100	Persen	445.450.156	100,00	87,88			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800	laporan	8.000.000	800	laporan	8.000.000	100,00	100,00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	151.085.000	12	laporan	112.450.156	100,00	74,43			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	347.800.000	12	laporan	325.000.000	100,00	93,44			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	238.045.600	100	Persen	229.809.000	100,00	96,54			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	208.500.000	21	Unit	200.275.000	100,00	96,06			
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	29.545.600	14	Unit	29.534.000	100,00	99,96			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	51.000	Ton	904.788.000	59.617,25	Ton	887.819.500	116,90	98,12			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen	126.143.000	100	Persen	126.125.000	100,00	99,99			
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5	Paket	126.143.000	5	Paket	126.125.000	100,00	99,99			
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	570.075.000	100	Persen	570.034.500	100,00	99,99			
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	1050	Orang	570.075.000	1050	Orang	570.034.500	100,00	99,99			
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	100	Persen	208.570.000	100	Persen	191.660.000	100,00	91,89			
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12	Layanan	208.570.000	12	Layanan	191.660.000	100,00	91,89			
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Armada Kapal Perikanan yang tertib Administrasi Perizinan	35	Persen	21.650.000	25	Persen	21.650.000	71,43	100,00			
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Persentase Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	100	Persen	21.650.000	100	Persen	21.650.000	100,00	100,00			
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2	laporan	21.650.000	2	laporan	21.650.000	100,00	100,00			



			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	2.689	Ton	452.326.262	2.798,73	Ton	383.036.874	104,08	84,68		
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100	Persen	200.000.000	100	Persen	199.923.770	100,00	99,96		
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	20	kelompok	200.000.000	20	kelompok	199.923.770	100,00	99,96		
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100	Persen	252.326.262	100	Persen	183.113.104	100,00	72,57		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	paket	252.326.262	5	paket	183.113.104	83,33	72,57	Tidak Dapat dicairkan dikarenakan	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PRODUK PERIKANAN	1.425	Ton	88.900.000	1.409,19	Ton	80.900.000	98,89	91,00		
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	88.900.000	100	Persen	80.900.000	100,00	91,00		
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	70	Pelaku usaha	88.900.000	70	Pelaku usaha	80.900.000	100,00	91,00		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA PRODUKSI TERNAK UNGGULAN (PRODUKSI DAGING SAPI, DOMBA, KAMBING, TELUR)										
				- DAGING SAPI	309	Ton		306,43	Ton			99,17		
				- DAGING KAMBING	30	Ton		21,02	Ton			70,07		
				- DAGING DOMBA	51	Ton		47,41	Ton			92,96		
				- TELUR	400	Ton		608,90	Ton			152,23		
				PERSENTASE ANGKA KELAHIRAN TERNAK HASIL IB	100	%			%			-		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	Persen	56.929.040	100	Persen	56.732.000	100,00			
			Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6	Kali	56.929.040	6	Kali	56.732.000	100,00	99,65		
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,	100	Persen	209.700.000	100	Persen	159.000.000	100,00	75,82		
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Angka Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan (IB)	3.500	Kelahiran	209.700.000	2.800	Kelahiran	159.000.000	80,00	75,82	Tidak Dapat dicairkan dikarenakan	



			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana peternakan yang dikelola dengan baik	100	%	1.349.000.000	100	%	1.327.325.046	100,00	98,39			
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Cakupan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	1.349.000.000	100	Persen	1.327.325.046	100,00	98,39			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	1.349.000.000	2	Unit	1.327.325.046	100,00	98,39			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penangan/Pengendalian Kasus Penyakit Ternak	90	Persen	714.712.585	80	Persen	714.008.300	88,89	99,90			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	145.280.585	4	Kegiatan	145.243.500	100,00	99,97			
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12	Kecamatan	145.280.585	12	Kecamatan	145.243.500	100,00	99,97			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	451.725.000	100	Persen	451.057.800	100,00	99,85			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	kegiatan	451.725.000	12	kegiatan	451.057.800	100,00	99,85			
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Cakupan Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	100	Persen	79.707.000	100	Persen	79.707.000	100,00	100,00			
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12	Kali	79.707.000	12	Kali	79.707.000	100,00	100,00			
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Cakupan Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	100	Persen	38.000.000	100	Persen	38.000.000	100,00	100,00			
			Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12	Kali	38.000.000	12	Kali	38.000.000	100,00	100,00			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Peternakan yang menerapkan Sapta Pesona Peternakan	45	Persen	32.484.644	38	Persen	31.395.500	84,44	96,65			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Cakupan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	100	Persen	32.484.644	100	Persen	31.395.500	100,00	96,65			
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Kelompok	32.484.644	20	Kelompok	31.395.500	100,00	96,65			
							10.628.244.753			10.293.031.651		96,85			



Jumlah anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 10.628.244.753,-** dengan realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar **Rp. 10.293.031.651,-**. Dengan demikian dapat dilihat rata-rata pencapaian realisasi anggaran sebesar **96,85 %** dengan nilai realisasi serapan anggaran **Sangat Tinggi**. Hasil ini menunjukkan peningkatan pencapaian/realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar 3,23 % dari realisasi anggaran tahun 2022. Sebagai perbandingan, realisasi anggaran pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 dan Tahun 2023

TA. 2022			TA. 2023		
Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
16.502.262.932	15.449.040.858	93,62	10.628.244.753	10.293.031.651	96,85

Factor pendorong keberhasilan realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah kerjasama antara semua bidang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dalam merealisasikan program / kegiatan serta rendahnya pengembalian (*Silva*) yang bias disimpulkan bahwasannya terjadi kesesuaian antara rencana program/kegiatan dengan realisasi program/kegiatan pada tahun 2023.

Factor yang menghambat dalam realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 adalah terjadinya defisit anggaran pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mengakibatkan ada 1 (satu) paket bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang tidak dapat disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Dengan demikian diharapkan untuk tahun selanjutnya kendala-kendala seperti tersebut diatas tidak terjadi lagi sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan rencana realisasi yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran akhir tahun dapat lebih tinggi atau sama dengan tahun ini.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan tahun-tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada dan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan dan pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang semakin maju dan modern serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompetensi dan mampu bersaing menghadapi era digitalisasi dan informasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya Laporan Kinerja tahun 2023 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Disadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala/permasalahan. Meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja periode selanjutnya. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.